

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang amat sakral sehingga ia tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal yang akan memberikan dampak yang kurang baik dalam keluarga, karenanya Islam memandang perkawinan sebagai “kontrak yang berat” dan “janji yang kuat” (غليظاً ميثاقاً) yang tidak mudah dilepaskan dan masing-masing pihak memikul tanggung jawab serta menggalakkan kesungguhan hatinya untuk memelihara dan menepati kontrak tersebut dari berbagai kekerasan dan kesulitan hidup yang sering menggangukannya.¹ Dengan demikian, selain menganggap kalau pernikahan itu dapat memelihara diri dari kesulitan hidup atau yang lainnya, juga harus mengetahui apakah seseorang sudah layak atau belum untuk menikah, sebagaimana yang tercantum dalam surat an-Nur Ayat 32 yaitu:



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sediri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*²

¹ Mahmud Syaltut, *Islam, Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1996), cet. ke- 1, h. 214.

² Depertemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Proyek Pengadaan kitab suci al-Qur'an, 1995), h 549.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.³ Sesungguhnya nikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan menyelesaikan harapan Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak umatnya.⁴

Hal tersebut dinyatakan dalam salah satu sabda Nabi SAW, riwayat Imam Bukhori dan Iman Muslim dari Ibn Abbas :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَوْحَشُ لِلْفَرْجِ. (رواه البخاري ومسلم عن عباس)

Artinya : *“Hai para pemuda barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.”*⁵

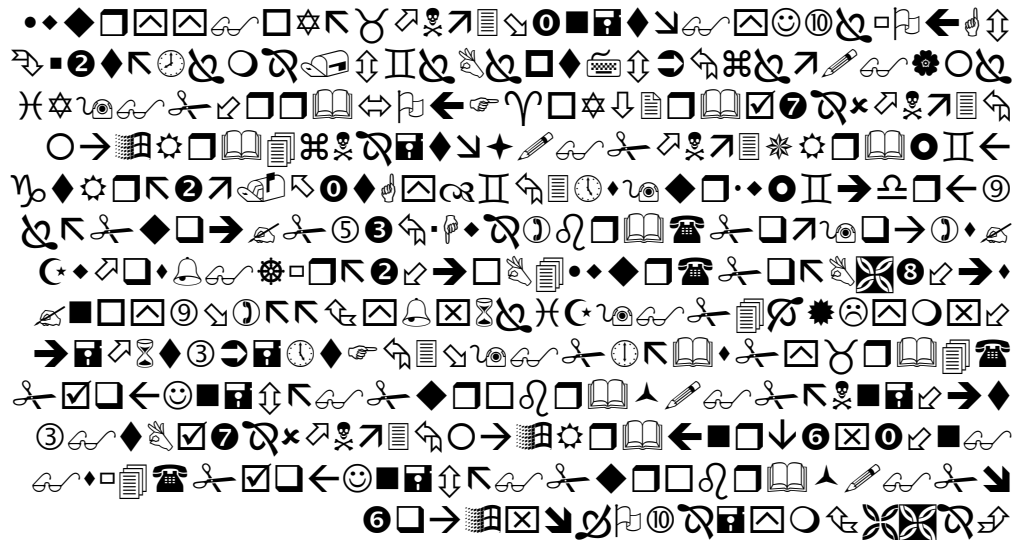
Islam memerintahkan menikah untuk menjaga kehormatan dan agama, Islam juga membolehkan adanya peminangan terlebih dahulu, peminangan dalam ilmu fiqh disebut dengan “*khitbah*” yang mempunyai arti permintaan.⁶ Adapun dasar hukum di bolehkan adanya peminangan ada dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-4, h, 15.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet ke- h, 33.

⁵ Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 1', h. 557.

⁶ Abd Shomad, *Pedoman Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 287.



Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.⁷

Selain itu, dalam melaksanakan pernikahan Nabi juga mensunahkan untuk melaksanakan *walimatul 'urusy*.⁸ Seperti yang ada dalam sabda Nabi SAW:

عن عامر بن عبد الله الذبيير عن ابيه رضى الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا

Artinya: “Dari Amir bin Abdullah al- Zubair dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahanmu”. (HR. Ahmad).⁹

⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 51.

⁸ Syaihk Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. ke-5, h.

⁹ Ash- Shan'ani, *Sublussalam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), Juz 3, h. 116.

Sementara itu di Desa Gunung Sahilan yang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan desa – desa yang masih kental adatnya yaitu desa Kebun Durian, Desa Sahilan Darussalam dan Desa Sumbaghak, dalam melaksanakan pernikahannya juga di mulai dari peminangan yang ditandai dengan upacara *manyuoktando* atau penerimaan peminangan kemudian pihak keluarga wanita mengadakan acara yang disebut *manunjuon tando*, *bakampuong* (memperlihatkan tanda pinangan) kepada *ninik mamak* untuk dirapatkan, Setelah tanda tersebut diterima, maka mereka berdua berada dalam masa tunangan dimana kedua pihak tidak diperkenankan menerima pinangan dari orang lain (pihak ketiga). Setelah menjalani masa pertunangan yang telah ditetapkan sebelumnya, baru dilaksanakan akad nikah, proses terakhir adalah bagholek (*walimah al -'urusy* atau pesta perkawinan).¹⁰

Akan tetapi sebelum melakukan akad nikah dan mengadakan pesta perkawinan di desa Gunung Sahilan ini yang mayoritas masyarakatnya muslim orang-orang yang ingin menikah, jika mereka adalah gadis atau bujangan maka mereka harus membayar masing-masing satu ekor kambing sebelum mengadakan pernikahan. Begitu jika ingin mengadakan pesta pernikahan maka mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi, karena ini merupakan hukum adat ataupun kebiasaan mereka dari pemuka-pemuka adat terdahulu. Menurut mereka ini adalah sebagai tanda ucapan terima kasih

¹⁰Iyurmanti. 38 Tahun (Anggota Masyarakat),wawancara. Gunung Sahilan 1 Nopember 2014.

cucu atau keponaan kepada *ninik mamak* yang telah dan akan membantu mereka, dan untuk membagi kebahagiaan mereka dengan yang lain.¹¹

Sebagaimana yang dikatakan roki, memang dengan adanya kebiasaan ini lebih mendekatkan diri terhadap sifat menghargai, kebersamaan dan berbagi, tetapi Jika disini seseorang yang ingin menikah itu tidak cukup uang untuk membayar hutang adat yang disyaratkan oleh *ninik mamak* maka pernikahannya tidak bisa diumumkan melainkan hanya ada acara akad nikah saja.¹²

Contoh kasus adalah Eva Yuliana. Ketika dia ingin menikah dia harus membayar satu ekor kambing karena setiap anak gadis dan anak laki – laki yang bujangan ingin menikah harus membayar satu ekor kambing yang layak di konsumsi terlebih dahulu, jika tidak dibayar maka dia tidak boleh menikah dan jika tetep ingin menikah maka tidak akan diperdulikan oleh *ninik mamak* sebelum membayar satu ekor kambing tersebut, disini dia tidak bisa membayarnya dan terpaksa dia melangsungkan pernikahan hanya dengan acara akad nikah saja tanpa dihadiri *ninik mamak*.¹³

Contoh kasus berikutnya Nurfitri yang tidak bisa melakukan pesta pernikahan (*walimatu 'urusy*), karena dia tidak memiliki uang lebih setelah membayar hutang kepada adat yang merupakan keharusan dalam adat jika ingin mengadakan pesta pernikahan.¹⁴

¹¹ Rustam AR, Datuok *Botua(Ninik Mamaksuku patopang)*, wawancara, Gunung Sahilan, 16 Nopember 2014.

¹²Roki (masyarakat), wawancara, Gunung Sahilan, 19 Nopember 2014.

¹³ Eva Yuliana 27 Tahun, wawancara, tanggal 19 Nopember 2014.

¹⁴Nurfitri, 22 Tahun, wawancara, Gunung Sahilan 18 Nopember 2014.

Dari informasi awal di atas, muncul banyak pertanyaan di antaranya adalah apa pandangan Islam terhadap hal tersebut, mengingat sepanjang pengetahuan penulis bahwa hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perseorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kewajiban membayar hutang adat tersebut dan apa yang melatar belakangi adanya kewajiban membayar hutang adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Karena itulah dilakukan penelitian tentang kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Adapun penelaah terhadap kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri, karena penulis merasa hal tersebut lebih menonjol dari hal yang lain di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Kasus-kasus ini mungkin juga terjadi di tempat lain, namun sebatas pengetahuan penulis kasus yang nyata penulis temukan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada “Kewajiban Membayar Hutang Adat Bagi Suami Istri Menurut Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

¹⁵Abdul Rahman,*op.cit.*,h.13.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang diteliti, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa latar belakang kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mendapat pengetahuan tentang latar belakang kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mendapat pengetahuan tentang bagaimana kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mendapat pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami isteri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

E. Review Studi Terdahulu

Di antara para peneliti yang membahas tentang permasalahan hukum adat adalah Fitra Dianur dengan penelitian yang berjudul *Sanksi Hukum Terhadap Pembatalan Pertunangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat)*. Dengan kesimpulan pertunangan yang dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Merangi merupakan adat yang berkaitan langsung dengan proses meminang yang sudah ada dalam Islam dan dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-khitbah*.¹⁶

Ruhima Hasanah dengan penelitian yang berjudul *Larangan Nikah dan Turun Bersama dua Orang Bersaudara pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura)*. Dengan

¹⁶Fitra Dianur,” *Sanksi Hukum Terhadap Pembatalan Pertunangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Merangin Kecamatan Bangkinang Barat)*”, Skripsi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2009), cet. ke-1, h. 73.

kesimpulan dalam adat nikah dan turun bersama dua orang bersaudara merupakan suatu larangan, karena pernikahan semacam itu merupakan suatu hal yang tabuh dan jarang terjadi. Tetapi jika ditinjau menurut hukum Islam pernikahan tersebut boleh dilakukan (*mubah*) bahkan sangat dianjurkan karena mempunyai mamfaat yang lebih besar yaitu hemat menghindari keborosan dan kemubaziran.¹⁷

Dari penelaahan terhadap karya-karya diatas, terlihat bahwa para penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan adat. Akan tetapi, kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, sepanjang pengetahuan penulis belum diteliti. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan peelitian tersebut.

F. Kerangka Teoretik

Permasalahan di atas tidak bisa dilepaskan dari teori *uruf* dalam *ushul fiqih*. *Uruf* secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik, yang dapat diterima akal sehat.¹⁸

Dilihat dari sisi boleh tidak bolehnya di pakai uruf terbagi dua:

1. *Uruf sah* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadis), tidak

¹⁷Ruhima Hasanah, "*Larangan Nikah dan Turun Bersama dua Orang Bersaudara pada Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Desa Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura)*". Skrifsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, 2005), cet. ke-1, h. 60

¹⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Badung: CV. Pustaka Setia, 2000), cet. ke-1, h. 159

menghilangkan keselamatan mereka dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.¹⁹

2. *Uruf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.²⁰

Adat dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan sesuatu hukum, bahkan didalam sistem hukum Islam kita kenal *qa'idah kulliyah fiqhiyah* yang berbunyi:

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”²¹

Dan dalam kaidah lainnya yang berbunyi:

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

Artinya : “sesuatu yang ditetapkan ‘adat/uruf seperti yang ditetapkan dengan dalil syara’”.²²

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Gunung Sahilan kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini karena adat disini masih sangat kental.

2. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁹*Ibid.*, h.163.

²⁰*Ibid.*

²¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.Raja Graha Persada, 1999), cet. ke-2, h. 123.

²²Djazuli, Nurol Aen, *Usul Fiqh*, (Jakarta:PT. Grafindo Prasada, 2000), cet. ke-1, h. 185.

- a. Subjek²³ penelitian ini adalah masyarakat Desa Gunung Sahilan yang terikat dengan hukum adat di desa tersebut, yang terdiri dari pemuka adat dan masyarakat adatnya
- b. Objek²⁴ dalam penelitian ini adalah kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi²⁵ dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di Desa Gunung Sahilan kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang berjumlah 670 KK²⁶, karena populasi terlalu banyak maka penulis mengambil 2% dari populasi menjadi sebanyak 13 KK orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*²⁷, dengan kriteria 10 KK yang membayar hutang adat dan 3 KK yang tidak membayar.

4. Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer²⁸ yaitu data yang penulis diperoleh dari responden, yaitu Masyarakat Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan.

²³Irwani Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke 3, h.57.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Data Demografi desa Gunung Sahilan

²⁷*Ibid.*

²⁸Husen Umar, *Metedologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Prasad, 2005), cet. ke-4, h. 42.

- b. Data Sekunder²⁹ yaitu data yang diperoleh dari bahan referensi atau perpustakaan atau buku- buku yang berhubungan dengan penelitian ini, serta ulama dan Tokoh Masyarakat setempat.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau phenomena yang terjadi di lapangan.³⁰
- b. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan Tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis kepada sampel penelitian tentang masalah-masalah yang diteliti.³¹
- c. Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dari berbagai dokumen- dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³²

6. Metode Penulisan

- a. Metode deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan masalah-masalah yang dibahas sesuai dengan data yang terkumpul serta menganalisa data tersebut dan membahas sehingga menghasilkan hukum menurut agama Islam.³³

²⁹*Ibid.*

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remajaa Rosdakarya, 1996), cet. ke-7, h. 125.

³¹Burhan Bugin, *Penelitian Kulitatif: Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), ed. 1 cet.ke-1, h. 14.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

- b. Metode deduktif yaitu menggambarkan kaidah yang umum kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode induktif yaitu menggambarkan data- data khusus, kemudian di analisa dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Metode Analisa Data

Penelitian ini akan meneliti tentang Kebiasaan membayar hutang adat sebelum menikah, maka untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan analisa kualitatif, yaitu setelah data tersebut terkumpul melalui observasi, wawancara dan angket, penulis mengklarifikasikan melalui kategori atas dasar persamaan data tersebut, antara satu data dengan yang lainnya dihubungkan dan dibandingkan, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, review studi terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematikan penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum Islam secara Umum tentang Pernikahan dan Adat di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung sahilan

Kabupaten Kampar yang gambaran umum daerahnya akan dibahas di dalam bab II.

Bab II : Bab ini memberikan gambaran umum tentang Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kecamatan Kampar yang terdiri dari: keadaan geografis dan demografis, kehidupan beragama, pendidikan, keadaan social ekonomi dan adat istiadat. Di daerah ini sebagaimana yang terungkap dalam bab I adanya kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri yang ingin melaksanakan pernikahan. Adapun pembicaraan tentang pernikahan menurut hukum Islam ada pada bab III.

Bab III : Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan dan *walimah 'urusy* yang terdiri dari: pengertian pernikahan dan *walimah 'urusy*, dasar hukum pernikahan dan *walimah 'urusy*, rukun, syarat, dan pernikahan yang dilarang, serta pendapat ulama terhadap *walimah 'urusy*. Adapun tentang adat pernikahan di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar akan dibicarakan pada bab IV.

Bab IV : Merupakan bab tentang analisis hukum Islam tentang kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri yang berisi tentang: kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri, latar belakang adanya kewajiban membayar hutang adat bagi calon suami istri dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban membayar

hutang adat bagi calon suami istri di Desa Gunung Sahilan
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dari permasalahan sebelumnya disertai beberapa saran.